

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara bangsa yang plural. Hal ini terbukti jelas dari realitas kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, agama, ras, budaya dan bahasa. Realitas kemajemukan bangsa Indonesia ditandai dengan kekayaan kearifan dan peradaban bangsa. Namun, dalam menyatukan kemajemukan yang ada di Indonesia, para pendiri bangsa (*founding fathers*) merumuskan arah dasar hidup bernegara dan berbangsa dengan meletakkan pluralitas sebagai titik berangkat refleksi dan dasar pemikiran Pancasila.<sup>1</sup> Pancasila menjadi pola dasar dari cara berpikir dan bertindak yang mampu menampung kebhinekaan budaya, agama, suku dan ras di Indonesia.<sup>2</sup> Pola pengakuan akan keberagaman di Indonesia dirumuskan secara padat dan kaya makna dalam semboyan “Bhineka Tunggal Ika”. Semboyan ini memberikan pesan yang sangat jelas dan nyata bahwa tidak ada entitas etnis, agama, maupun kultur yang dominan dalam bangunan negara bangsa Indonesia.<sup>3</sup> Pesan ini mengindikasikan bahwa bangsa Indonesia harus hidup secara toleran dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dalam relasi antaragama, pengamalan nilai-nilai Pancasila dapat diwujudkan dalam dialog. Di Indonesia ketika berbicara tentang dialog antaragama perlu dilihat kembali hubungan agama dan negara. Negara berperan penting dalam mewujudkan kerukunan umat beragama tanpa memberi privilese kepada agama mayoritas. Dalam konteks Indonesia, dialog antaragama telah dikembangkan oleh pendiri bangsa ketika membentuk dan mendirikan bangsa Indonesia. Hubungan itu telah dikukuhkan melalui Pancasila dan UUD 1945. Hal ini termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi “Atas berkat rahmat

---

<sup>1</sup>Sylvester Kanisius Laku, “Pendahuluan”, dalam Dwikoratno dan Lani (ed.), *Pancasila Kekuatan Pembebas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2012), hlm. 26.

<sup>2</sup>Otto Gusti Madung, *Post-Sekularisme, Toleransi dan Demokrasi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2017), hlm. 45.

<sup>3</sup>Sylvester Kanisius Laku, *loc.cit.*

Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Rumusan ini mengindikasikan bahwa dalam membangun negara Indonesia tidak ada entitas agama yang dominan. Semua agama memiliki kedudukan yang sama di dalam negara. Namun dalam prakteknya ada kelompok-kelompok tertentu yang justru bersikap eksklusif. Sikap tersebut menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang menjadi motif terjadinya konflik. Tentunya sikap eksklusif menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia dan perlu diberantas secara komprehensif. Selain itu, dialog antaragama juga diperlukan untuk menghindari kasus penodaan agama (*blasphemy*). Argumen utamanya adalah ketersinggungan suatu individu atau kelompok agama. Dalam banyak kasus, sikap eksklusif justru dijadikan alat mobilisasi, bahkan untuk menyulut konflik kekerasan yang fatal.<sup>4</sup> Menyikapi hal ini dibutuhkan suatu resolusi dalam upaya memerangi intoleransi, diskriminasi dan kekerasan atas nama agama. Bangsa Indonesia menekankan pentingnya sikap menerima dan mengakui antara pemeluk keyakinan-keyakinan agama yang beraneka dalam menolak tindakan eksklusif dan menggantikannya dengan sikap inklusif dan pluralis.

Namun, iklim toleransi di Indonesia seolah-olah tidak dapat membendung kekerasan atas nama agama. Dalih-dalih kelompok radikal terus mengancam kedudukan Pancasila sebagai dasar hukum dan menolak keyakinan agama lain. Masalah seperti ini harus dipecahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik normatif dipertajam oleh kenyataan bahwa setiap agama mengklaim memiliki kebenaran absolut.<sup>5</sup> Kekerasan atas nama agama diartikan sebagai sikap intoleran dan sikap eksklusif dengan menganggap ajaran agamanya saja yang paling benar. Akibatnya, muncul gerakan radikalisme yang menolak kehadiran Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. Kaum radikal seringkali menggunakan tindak kekerasan untuk mencapai tujuannya. Pada satu sisi, sikap

---

<sup>4</sup>Zainal Abidin Bagir, “Kajian tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dan Implikasinya untuk Kebijakan”, dalam Ihsan Ali-Fauzi, dkk (ed.), *Kebebasan, Toleransi dan Terorisme: Riset dan Kebijakan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Paramadina, 2017), hlm. 69.

<sup>5</sup>Mathias Daven, “Klaim Kebenaran dan Toleransi dalam Konteks Hubungan Antara Islam dan Kekristenan di Indonesia”, dalam Yosef Keladu Koten dan Otto Gusti Madung (ed.), *Menalar Keadilan* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2022), hlm. 85.

intoleran menjadi bencana kemanusiaan yang mengguncang sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Di sisi lain, intoleransi menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan menghambat pertumbuhan pluralisme di Indonesia.

Memasuki abad ke-21, banyak persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara Indonesia. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian publik adalah munculnya kekerasan di dalam kehidupan beragama. Kekerasan bukan hanya diartikan sebagai kekerasan fisik, melainkan juga merujuk pada segala sesuatu yang secara psikologis destruktif, yang merusak dan merendahkan martabat orang lain.<sup>6</sup> Sikap dan tindakan seperti ini menghambat pertumbuhan dan perkembangan iklim toleransi di Indonesia. Kekerasan agama (*religious-based violence*) adalah istilah yang mencakup semua fenomena di mana agama dalam tiap bentuknya menjadi objek atau subjek kekerasan.<sup>7</sup> Agama kerap kali dijadikan sebagai basis dan tempat, subjek dan objek dalam mengintimidasi kelompok minoritas. Tentunya tindakan seperti ini dibayangi oleh sikap penolakan terhadap keyakinan-keyakinan agama lain. Penolakan terhadap keberadaan agama-agama lain mengandaikan suatu sikap eksklusif dengan dalih bahwa agamanya saja yang memiliki kebenaran.

Toleransi merupakan suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok tertentu atau penindasan terhadap pemeluk agama minoritas yang menyebabkan penderitaan bagi mereka. Berdasarkan definisi tersebut, toleransi mengungkapkan suatu keuletan yang aktif dalam menahan penderitaan. Penderitaan yang dimaksudkan itu tampil dalam bentuk konflik sosial yang ditandai oleh sikap subyektif berupa prasangka dan diskriminasi karena adanya hubungan yang mendominasi. Tetapi dalam konteks agama, toleransi bukan lagi dilihat sebagai sebuah penderitaan, melainkan membiarkan agama atau keyakinan-keyakinan asing bertumbuh.<sup>8</sup> Karena itu, toleransi di Indonesia dapat dipahami sebagai sikap terbuka terhadap keberadaan

---

<sup>6</sup>Ahmad Zainul Hamdi dan Muktafi, "Intoleransi, Ujaran Kebencian, Hingga Dialog Antariman", dalam Ahmad Zainul Hamdi Muktafi (ed.), *Wacana dan Praktik Pluralisme Keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Daulat Press, 2017), hlm. 16.

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Otto Gusti Madung, *op.cit.*, hlm. 47.

orang lain. Pada prinsipnya, toleransi sangat menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia. Praktek toleransi yang mengedepankan martabat manusia telah dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kehidupan sosial masyarakat di NTT begitu harmonis, meski hidup di tengah keberagaman suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Menurut Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, jumlah penduduk di NTT pada tahun 2021 sebanyak 5.387.378 jiwa. Jumlah penduduk tersebut berasal dari latar belakang suku, agama, ras dan antargolongan yang berbeda. Antusiasme masyarakat di NTT untuk menerima keberagaman dan perbedaan sangat tinggi. Hal tersebut terbukti melalui pola pengembangan kerukunan umat beragama di NTT yang dilakukan sebagai upaya mengantisipasi konflik SARA.

Untuk itu, relasi antaragama mutlak dibutuhkan dalam kehidupan beragama. Kesadaran untuk menerima perbedaan seyogyanya menggerakkan kelompok agama agar menjadi pioner bagi terciptanya kerukunan hidup bersama. Nilai-nilai yang dihidupi oleh setiap agama seperti toleran, moderat, terbuka merupakan representasi dari ajaran setiap agama tersebut. Pengamalan nilai-nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam praktek relasi agama Islam dan Katolik yang diidealkan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat NTT. Bagi masyarakat NTT kerukunan umat beragama mutlak perlu dan kerap kali menjadi landasan dasar dalam menghimpun keberagaman. Bagi semua agama dialog menjadi tolok ukur dalam mencapai kerukunan. Bentuk dialog antaragama dapat dilihat dalam hubungan Islam dan Katolik di NTT. Dalam hubungannya, Islam dan Katolik mengedepankan sikap terbuka, menyelenggarakan musyawarah antarumat beragama dan melawan intoleransi. Hal itu terlihat jelas dari kerukunan yang dibentuk tanpa melihat latar belakang politik, sosial, budaya dan agama. Terlepas dari berbagai masalah dan tantangan kerukunan umat beragama, penulis mencoba melihat bagaimana potret kehidupan umat beragama di NTT; pendekatan apa yang dilakukan oleh masyarakat NTT dalam menjaga kerukunan umat beragama. Berangkat dari realitas kemajemukan di NTT, penulis tertarik untuk mendalami toleransi yang dibangun oleh masyarakat NTT tersebut.

Penulis melihat bahwa potret kehidupan umat beragama di NTT sangatlah toleran. Hal ini terlihat jelas dalam predikat yang diperoleh masyarakat NTT pada tahun 2021, di mana provinsi NTT meraih indeks tertinggi kerukunan umat beragama (KUB).<sup>9</sup> NTT bukan hanya dikenal karena keberagaman suku dan budaya, melainkan juga keberagaman ras dan agama. Hal ini terlihat jelas dalam keberagaman agama yang ada di NTT, seperti agama Katolik, Islam, Protestan, Hindu, Buddha dan Konghucu. Secara spesifik penulis melihat hubungan sosial antara agama Islam dan Katolik yang toleran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Masyarakat NTT dari aspek sosial memiliki hubungan yang toleran dengan mengedepankan sikap saling terbuka dan menerima satu sama lain sebagai satu paguyuban. Sikap saling terbuka dan menerima adalah suatu bentuk tindakan antisipatif dalam mengatasi terjadinya kekerasan antaragama. Kekerasan antaragama disebut sebagai bencana kemanusiaan yang harus diperangi agar tidak bertumbuh subur dalam keberagaman yang ada. Bentuk penolakan terhadap kekerasan atas umat beragama telah dilakukan di seluruh daerah di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya.

Sebagai tindakan preventif dalam mengatasi terjadinya kekerasan atas nama agama sebagai akar penghambat bertumbuhnya toleransi, maka penulis mencoba menawarkan potret hubungan agama Islam dan Katolik yang toleran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, penulis merampung tulisan ini di bawah payung judul: **Merevitalisasi Hubungan Islam dan Katolik yang Toleran di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Upaya Mengatasi Kekerasan Atas Nama Agama**. Di sini, penulis yakin bahwa kerukunan yang dibangun oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur dapat dijadikan sebagai landasan dan alternatif dalam upaya mengatasi terjadinya kekerasan atas nama agama. Selain itu, toleransi umat beragama di Provinsi NTT juga dapat dijadikan sebagai parameter dalam merawat dan menjaga kemajemukan atau keberagaman bangsa Indonesia.

---

<sup>9</sup>Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, “NTT Raih Indeks Kerukunan Umat Beragama Tertinggi Tahun 2021”, dalam *Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi NTT*, <http://ntt.kemenag.go.id/berita/518067/ntt-raih-indeks-kerukunan-umat-beragama-tertinggi-tahun-2021>, diakses pada 25 Maret 2022.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan ulasan di atas, penulis mencoba merumuskan masalah yang menjadi tolok ukur dalam penulisan ini secara umum. Rumusan masalah tersebut dijadikan sebagai landasan dasar untuk meneliti persoalan pokok yang dikaji dalam tulisan ini. Selain itu, rumusan masalah juga dijadikan sebagai rujukan dasar sebelum melakukan peninjauan atau pengambilan data. Karena itu, beberapa rumusan masalah berikut dijadikan sebagai tesis dasar dalam penelitian ini, yakni (1) Apa itu kekerasan atas nama agama?; (2) Seberapa pentingkah relasi Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mengatasi terjadinya kekerasan atas nama agama?; (3) Bagaimana menjaga dan meningkatkan hubungan Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya mengatasi kekerasan atas nama agama?

## 1.3 TUJUAN PENULISAN

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut; *Pertama*, untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kekerasan atas nama agama (*religious based-violence*). *Religious based-violence* merupakan bentuk kekerasan yang mencakup semua fenomena di mana agama menjadi subjek dan objek tindak kekerasan. Sikap seperti ini terus menerus menjadi persoalan krusial di antara pelbagai masalah kemanusiaan. Karena itu, dalam memahami bentuk-bentuk kekerasan agama dibutuhkan suatu pedoman yang menjadi tindakan preventif dalam meminimalisir persoalan tersebut. Tindakan preventif yang dianjurkan di sini adalah membangun toleransi umat beragama. *Kedua*, untuk meningkatkan pemahaman penulis dalam memahami kekerasan agama dan menjadikan toleransi umat beragama sebagai upaya pengentasannya. *Ketiga*, melihat kembali relasi yang toleran antara agama Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai inspirasi dan motivasi dalam mengurangi tindakan kekerasan atas nama agama.

Dengan membaca tulisan ini, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Nusa Tenggara Timur khususnya agar tetap

menjaga keutuhan NKRI. Membangun toleransi umat beragama merupakan suatu sikap atau perbuatan yang toleran dalam menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI yang berdasar Pancasila.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi Sebagian dari tuntutan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana (Strata 1) Filsafat di lembaga Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.

## **1.4 METODE PENULISAN**

Dalam penulisan karya ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan dan kualitatif sebagai acuan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis mengumpulkan dan mendalami berbagai literatur yang berkaitan dengan judul tulisan ini. Berbagai macam literatur tersebut akan dikaji, ditelaah, dan digunakan sebagai landasan teoretis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

## **1.5 SISTEMATIKA PENULISAN**

Karya tulis ini terdiri dari lima bab. Dalam bab pertama, penulis menyajikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Dalam bab kedua, penulis memaparkan tentang hubungan Islam dan Katolik yang toleran. Bagian ini akan menguraikan pengertian akademis mengenai toleransi, potret hubungan Islam dan Katolik, toleransi dalam perspektif Islam dan Katolik, bentuk-bentuk toleransi umat beragama, sikap untuk memperkaya toleransi, tujuan toleransi umat beragama, dan hambatan-hambatan dalam mencapai toleransi umat beragama. Pada bagian terakhir bab ini akan ditutup melalui kesimpulan singkat.

Dalam bab ketiga, penulis akan menjabarkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan kekerasan atas nama agama. Di sini akan diuraikan definisi kekerasan atas nama agama, faktor-faktor penyebab kekerasan atas nama agama, dampak-dampak kekerasan atas nama agama, bentuk-bentuk kekerasan atas nama agama,

beberapa peristiwa aksi kekerasan atas nama agama di Indonesia, lalu ditutup dengan kesimpulan singkat berdasarkan penjelasan pada bab ini.

Dalam bab keempat, penulis akan menjelaskan tentang revitalisasi hubungan agama Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya mengatasi kekerasan atas nama agama. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan relasi agama Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pendekatan-pendekatan dalam mencapai kerukunan, relasi agama Islam dan Katolik yang toleran sebagai representasi untuk melawan kekerasan atas nama agama. Pada bagian akhir penjelasan, penulis menarik kesimpulan singkat berdasarkan pemaparan dalam bab ini.

Dalam bab kelima, penulis akan menyampaikan kesimpulan umum tentang toleransi umat beragama, kekerasan atas nama agama, dan relasi antara Islam dan Katolik di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai upaya mengurangi kekerasan atas nama agama. Selain itu, penulis juga menyampaikan usul dan saran bagi masyarakat, pemerintah, tokoh agama dan lembaga pendidikan, khususnya Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero.